UPAYA AUSTRALIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AUSAID) MELALUI PROGRAM BESIK II DALAM MENGATASI PERMASALAHAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI TIMOR LESTE

Josué Valentim Barreto Moniz¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Adi P. Suwecawangsa³⁾

123) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: jovbaniz_1304@yahoo.com¹⁾, idinfasisaka@yahoo.co.id²⁾,
adiswecawangsa@yahoo.co.id
3)

ABSTRACT

The Water, Sanitaion, and Hygiene (WASH) sector in Timor Leste is one of the number one domestic issue that continues to be improved through foreign assistance. One of the assistances came from AusAID which has been provided since 2002 through the Community Water and Sanitation Program which was then continued by the Rural and Sanitation Water or BESIK I and II programs in 2006 and 2012. In the BESIK II program, AusAID's focus was on technical issue by providing trainings for all levels of Timor Leste from the central government to the lowest level as a goal to utilize WASH infrastructures that was produced by the previous program and to improve the WASH sector in accordance with the targets of the Timor Leste Sustainable Development Goals. This study aims to describe the implementation of BESIK II towards that goal. This research was examined with the concept of program assistance and technical assistance. Using literature review techniques from sources and books related to the time with locus of research is from 2012-2016.

Keywords: aid program, technical assistance, WASH, BESIK II

1. PENDAHULUAN

Sejak resmi memperoleh kedaulatannya pada tanggal 20 Mei 2002, Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah. Salah satunya adalah permasalahan air bersih dan sanitasi. Lebih dari 40 persen dari 1,2 juta penduduk Timor Leste hidup dibawah garis kemiskinan, dalam kondisi dimana akses terhadap air bersih dan sanitasi sering tidak ada (Ucanews, 2014). Permasalahan air bersih dan sanitasi atau Water, Sanitation, Hygiene (WASH) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Timor Leste untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs).

Di Timor-Leste, ada perbedaan antara populasi perkotaan dan pedesaan, dengan

hanya 61 persen penduduk pedesaan Timor vang menerima air dari sumber vang lebih baik dibandingkan dengan 95 persen rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, hanya 59,9 persen sekolah dasar (kelas 1 sampai 9) memiliki akses ke sumber air yang ditingkatkan dan 70,2 persen dengan toilet (40,3% fungsional dan 29,9% berfungsi sebagian), dan hampir setengah dari Pos Kesehatan pedesaan tidak memiliki akses ke air yang mengalir dan memiliki fasilitas sanitasi yang buruk dan kebersihan yang tidak memadai. Praktik sanitasi dan kebersihan yang buruk berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kekurangan gizi di Timor-Leste. (UNICEF, 2014)

Sanitasi dasar, praktik kebersihan yang lebih baik, sumber air minum yang aman dan lebih banyak air untuk mencuci dapat mencegah penyakit terkait air, penyakit lain, dan kematian, terutama pada anak-anak. Itu juga dapat mendukung perawatan yang lebih baik bagi ibu dan anak di fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, yang pada gilirannya mendorong kehamilan yang aman dan bayi yang sehat.

Jumlah kematian akibat penyakit umum dan yang dapat dicegah di Timor-Leste terus meningkat, termasuk malaria dan penyakit pernafasan. Pada tahun 2009, harapan hidup saat lahir adalah 62 Diperkirakan bahwa tingkat kematian ibu di Timor-Leste masih berkisar antara 440 dan 557 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara kematian bayi adalah 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Diare sangat umum di kalangan anak-anak. Ini menyumbang 11% kematian balita dan survei terbaru menemukan 16% dari semua anak dibawah lima tahun mengalami diare dalam dua minggu sebelumnya. Tingkat infeksi parasit tinggi, terutama di kalangan anak usia sekolah. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar, termasuk fokus khusus pada kesehatan ibu dan anak, adalah pilar dari Strategi Negara Australia-Timor-Leste 2009-2014 (Strategi Negara).

Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah Timor Leste melakukan upaya dalam pembangunan negara melalui diplomasi dengan negara maju berkembang untuk mendapatkan bantuan. Diplomasi tersebut berhasil dilakukan pemerintah Timor Leste. Hal ini dapat dilihat bahwa Timor Leste mendapatkan bantuan luar negeri dari berbagai organisasi internasional, seperti PBB, World Bank, agensi pembangunan internasional (AusAID

dan JICA), dan pelaku bisnis asing (Mahardika, 2017).

Usaha pemerintah Timor Leste tertuang dalam kerangka strategi pemerintah lokal Strategic Development Plan 2011-30 (SDP). Salah satu permasalahan yang tercakup dalam SDP tersebut adalah permasalahan WASH. Dalam rencana pengembangan strategis 2011-2030, pemerintah Timor Leste menjanjikan pasokan air 24 jam dan sanitasi untuk rumah tangga di seluruh kabupaten, dan ditargetkan bahwa seluruh masyarakat Timor Leste akan memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2030.

Timor Leste mendapatkan bantuan asing salah satunya dari Australia. Australia sendiri merupakan salah satu negara pendonor terbesar di Timor Leste sejak tahun 1999 (Mahardika, 2017). Salah satu agensi bantuan pembangunan di Australia adalah Australian Agency for International Development (AusAID). AusAID memiliki fokus program dengan Timor Leste yang tertera dalam Strategic Planning Agreement for Development yaitu Saving Lives, Promoting Opportunities for All, Supporting Sustainable Economic Development dan Effective Governments.

Bantuan pembangunan dari Australia berkontribusi terhadap tujuan bersama kedua negara untuk bangsa yang makmur dan aman, mendukung rakyat Timor-Leste untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan Sustainable Development Goals (SDGs).

AUSAID Bantuan terhadap permasalahan air bersih dan sanitasi di Timor Leste sendiri telah mulai sejak tahun 2002 melalui tiga tahap bantuan. Tahap pertama adalah Community Water Supply and Sanitation Program (CWSSP) yang dimulai pada tahun 2002 hingga 2005. Tahap kedua adalah Rural Water Supply and Sanitation Program atau dalam Bahasa tetum disebut Bee, Saneamentu no Ijiene iha Komunidade I (BESIK I) dimulai pada tahun 2007 hingga 2012. Tahap terakhir dari bantuan AUSAID kepada Timor Leste adalah Bee, Saneamentu no ljiene iha Komunidade II (BESIK II) dimulai pada tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2016.

BESIK II ini merupakan program terakhir dari tiga tahap untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih di Timor Leste yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Berbeda dari dua tahap sebelumnya, BESIK II ini mendapatkan perlakuan/dasar baru dibawah kerangka kerja sama pemerintah Timor Leste dan AusAID. Pada hal tersebut, pemerintah Timor Leste dan AusAID telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sanitasi dan air bersih melalui perjanjian yang tertuang dalam Strategic Agreement for Development Planning (SPAD) pada tahun 2011. Kedua negara menetapkan visi bersama untuk bekerja sama dalam memperkuat ikatan antara hubungan kedua bangsa tersebut. Perjanjian ini berdasarkan dengan prinsip pertemanan dan tanggung jawab untuk mencapai peningkatan pembangunan. Secara prinsip, perjanjian ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Timor Leste. Prioritas perjanjian ini adalah pembangunan dengan

fokus utama yaitu Saving Lives, Promoting Opportunities For All, Sustainable Economic Development, dan Effective Governance and Security.

Perjanjian SPAD merupakan gabungan dari komitmen pemerintah lokal Timor Leste melalui strategi pembangunan nasional yaitu SDP 2011-2030 dengan kebijakan luar negeri Australia dalam pemberian bantuan. Dalam SPAD 2011, kedua belah pihak menargetkan akan mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals 2030 salah satunya adalah permasalahan sanitasi dan bersih. Untuk itu. penulis akan menganalisis bagaimana upaya AusAID dalam mencapai target-target tersebut melalui program BESIK II.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Literatur pertama adalah skripsi berjudul "Analisis Bantuan Luar Negeri Australia di Timor Leste (Studi Kasus AusAID Tahun 2011 - 2013)" oleh Deya Mahardika tahun 2017. Skripsi ini berfokus pada bantuan yang diberikan Australia melalui badan bantuan Australia vaitu AusAID terhadap Timor Leste pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2011, Australia memberikan bantuan dengan melakukan suatu perjanjian kerja sama bantuan yaitu Planning Agreement Strategic Development. Dalam penelitian ini, fokus utama bantuan Australia di Timor Leste dalam perjanjian tersebut adalah Promoting Opportunities for ΑII dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan bantuan

luar negeri. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa pemberian bantuan Pendidikan terhadap Timor Leste melalui AusAID merupakan strategi Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya berdasarkan kebijakan bantuan luar negeri Australia yaitu An Effective Aid Program for Australia: Making a real difference – Delivering real.

Penelitian ini membantu penulis dalam memetakan bantuan AusAID terhadap Timor Leste melalui Strategic Planning Agreement for Development 2011 adalah untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) dimana sektor WASH Timor Leste termasuk dalam salah satu MDGs. Untuk mencapai tujuan tersebut, AusAID membantu Timor Leste melalui program BESIK II. Adapun. Australia melalui AusAID merupakan negara donor terbesar hingga 2016 di Timor Leste dengan bentuk bantuan hibah, yaitu tidak ada pengembalian dana ke Australia.

Literatur kedua adalah skripsi berjudul "Upaya ILO-IPEC Melalui WACAP Dalam Mengeliminasi dan Mencegah Pekerja Anak Pada Perkebunan Kakao di Ghana" oleh Prema Vipassani tahun 2015. Penelitian tersebut mengkaji bantuan luar negeri sebagai upaya organisasi internasional (ILO), berkolaborasi dengan pemerintah Ghana, beberapa NGO serta komunitas-komunitas lokal untuk mengeliminasi dan mencegah masalah pekerja anak di Ghana.

Penelitian Vipassani membantu penulis untuk menggunakan dan melihat lebih lanjut mengenai konsep bantuan luar negeri pada program AusAID melalui BESIK II terhadap Timor Leste. Penulis akan mengklasifikasikan apa program BESIK II tersebut kemudian menganalisi lebih lanjut upaya AusAID dalam program BESIK II dengan konsep turunan dari konsep bantuan luar negeri yaitu bantuan program (programme aid) dan bantuan teknis (technical assistance).

2.2 Kerangka Pemikiran

1. Bantuan Program

Salah satu ienis pemberian bantuan luar negeri menurut Riddel (2008) adalah bantuan program. Bantuan program merupakan bentuk bantuan yang dominan bagi para negara donor besar dalam pertumbuhan terhadap jumlah negara penerima bantuan. Meskipun, secara agregat, masih relatif kecil. Bantuan ini bertujuan untuk pembangunan jangka panjang. Riddel (2008) juga menjelaskan bahwa dalam bantuan program, para negara donor cenderung menggunakan sector-wide approach (SWAp) daripada project aid.

SWAp adalah pelibatan lembaga donor dalam mendukung strategi sektoral yang dipimpin oleh pemerintah negara penerima, serta kesepakatan antara donor dan pemerintah penerima mengenai parameter yang luas untuk menerapkan dan mengelola strategi sektor dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Negara donor mendukung sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, atau pendidikan dengan tujuan membantu pemerintah mencapai tujuan program-program tersebut

(Riddel, 2008). SWAp secara umum mendukung program-program yang dipimpin oleh negara secara komprehensif dan terkoordinasi. SWAp sendiri lebih cocok bagi negara penerima yang termasuk dalam low-income countries (LIC)

Kanda (2004) menjelaskan bahwa SWAp dapat meningkatkan pembangunan negara penerima melalui kepemilikan dan kepemimpinan negara penerima yang lebih kuat, dialog terkoordinasi dan terbuka untuk seluruh program sektor. meningkatkan manfaat dengan berfokus pada keseluruhan program dan menerapkan standar perlindungan umum, karena fokus pada program tertentu sehingga alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien, memperkuat kapasitas, sistem & lembaga negara pada kecepatan dan fase yang layak dengan partisipasi pemerintah negara penerima, mengurangi pelaporan & transaksi duplikat, dan fokus yang lebih besar pada hasil (bukan pada input kontrol transaksi).SWAp atau menyoroti pentingnya koordinasi perencanaan strategis dalam mendukung prioritas pemerintah bersama dengan negara donor. Salah satu aspek yang disorot pada SWAp adalah alokasi dana yang lebih hemat dan efektif dibanding berbagai diskrit bantuan proyek.

Bantuan Australia kepada Timor Leste ini berfokus pada sektor water, sanitation, and hygiene (WASH) karena melihat permasalahan sektor tersebut masih cukup tinggi terutama di area pedalaman Timor Leste. Dengan memfokuskan pada sektor WASH ini, bantuan Australia diharapkan dapat

memberikan dampak terhadap perkembangan SDG Timor Leste. Hal tersebut dilakukan dengan program BESIK, yang memiliki tiga tahapan yaitu CCWSC, BESIK I, dan BESIK II. Dengan begini, pemberian bantuan dapat dengan mudah dianalisis dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dari masing-masing tahapan program BESIK. Seperti CCWSC yang lebih berfokus pada sektor WASH dengan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat desa dan program BESIK I yang lebih berfokus pada pelayanan air pedesaan dengan terus menindaklanjuti hasil dari tahapan sebelumnya. Dengan SWAp, pemberian bantuan lebih terstruktur, sistematis, dan terarah kepada tujuan.

Dalam pelaksanaan SWAp. sebuah bentuk kerja sama oleh kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk menjadi jaminan komitmen pihak yang terkait (negara donor dan penerima). Kerja tersebut agar sama program yang dijalankan dalam SWAp dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif melibatkan kedua belah pihak. Untuk itu perjanjian di awal seperti MoU, resolusi mekanisme, code of conduct, dll antar kedua belah pihak harus disepakati bersama selain sebagai bentuk komitmen dan juga sebagai kerangka mekanisme keberlangsungan program bantuan (Riddel, 2008). Pada program BESIK II, antara Australia dan Timor Leste telah menandatangani kerja sama SDP yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian Timor Leste terhadap SDG seperti tertuang dalam tujuan nasional Timor Leste.

2. Bantuan Teknis

Bantuan teknis berkaitan dengan pembentukan technical cooperation (kerja sama teknis) antara pendonor dan negara penerima. Kerja sama bantuan teknis merupakan bantuan yang melibatkan para ahli dalam merancang mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk menangani masalah di lapangan, serta bertujuan untuk meningkatkan mempromosikan atau pembangunan. (Vipassani, 2015). Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan melalui pelatihan-pelatihan, transfer ilmu dan keahlian oleh tenaga ahli international kepada pemerintah maupun masyarakat penerima.

Bantuan teknis dianggap diperlukan terutama untuk mengisi kesenjangan keterampilan dan pengetahuan, anggapan bahwa keterampilan dan pengetahuan ini sebagian besar berada dimiliki oleh negara donor, dan bahwa ini diperlukan (secara sederhana) untuk ditransfer ke negaranegara penerima bantuan. Dengan adanya transfer dan peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat lokal maka akan meningkatkan kemampuan produktif negara penerima melalui sumber daya manusianya. Bantuan Teknis yang disediakan terkait dengan proyek-proyek bantuan lain, menyediakan komponen teknis yang dan pengetahuan penting dalam mempersiapkan dan 'menyampaikan' hasil proyek. (Riddel, 2018)

Bantuan teknis ini juga memiliki tantangannya yaitu jika transfer pengetahuan, dan keterampilan ini gagal dan tidak terintegrasi dengan masyarakat lokal, maka program-program sebelumnya dianggap sia-sia. dalam Untuk itu, pemberian bantuan teknis, negara donor memperhatikan hal-hal wajib 2018): Negara-negara (ActionAid, (1) penerima harus diizinkan untuk mengambil kepemilikan atas pengembangan kapasitas mereka sendiri, mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri dan menentukan apakah ini paling baik dilayani dengan asisten teknis lokal atau asing. (2) Memberikan ilmu berdasarkan apa yang dibutuhkan negara penerima, bukan apa yang dimiliki negara donor. (3) Memperhatikan solusi yang sesuai kondisi domestik negara penerima.

Dengan adanya transfer kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan bantuan teknis ini memiliki tujuan jangka panjang agar negara penerima tidak mengalami ketergantungan terhadap negara donor. Tujuan pada program BESIK II ini juga lebih ke pada pemanfaatan infrastruktur yang telah diberikan sebelumnya, antara lain dalah (1) pemerintah Timor Leste agar merumuskan dan menerapkan kebijakan efektif terkait perkembangan, perencanaan, dan manajemen layanan air bersih dan sanitasi, (2) agar komunitas masyarakat pedesaaan dapat memiliki akses mampu memanfaatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan (3) agar sekolah sekolah yang terpilih memiliki akses dan mampu memanfaatkan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Pada program BESIK II, bantuan teknis yang diberikan adalah mengenai operation and management terhadap sistem

dan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang telah dicapai pada program CWSSP dan BESIK I sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjadi support terhadap hasil dari program-program sebelumnya dan menjadi penghubung bagi program baru nantinya. Sehingga masyarakat lokal Timor Leste dapat dengan mandiri menunjang sektor WASH.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitiatif. Menurut Bungin (2007), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian menjadi objek penelitian. Mahardika (2015) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Kondisi Sektor Wash Timor Leste

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pasca merdeka upaya untuk membangun kembali jalan, fasilitas kesehatan dan sistem irigasi, namun infrastruktur pasokan air untuk kebutuhan domestik, sanitasi dan industri masih belum berkembang dan memerlukan investasi besar. Timor Leste masih rapuh dalam perkembangan ekonomi dan

sosialnya, dengan ketergantungan tinggi pada penurunan minyak dan sumber daya gas untuk penerimaan negara. Kurang lebih 41,8 persen populasi dalam kemiskinan, penghasilan kurang dari US \$ 48,37 per bulan dan karena kekurangan gizi dan akses yang buruk air bersih dan sanitasi, 50,2 persen anak-anak terhambat pada tahun 2013, jatuh ke 49,2 persen di tahun 2014. (World Bank, 2014)

Di Timor-Leste, ada perbedaan antara populasi perkotaan dan pedesaan, persen penduduk dengan hanya 61 pedesaan Timor yang menerima air dari sumber yang lebih baik dibandingkan dengan 95 persen rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, hanya 59,9 persen sekolah dasar (kelas 1 sampai 9) memiliki akses ke sumber air yang ditingkatkan dan 70,2 persen dengan toilet (40,3% fungsional dan 29.9% berfungsi sebagian), dan hampir setengah dari Pos Kesehatan pedesaan memiliki akses ke air yang mengalir dan memiliki fasilitas sanitasi yang buruk dan kebersihan yang tidak memadai. Praktik sanitasi dan kebersihan yang berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kekurangan gizi di Timor-Leste. (UNICEF, 2014)

Sanitasi dasar, praktik kebersihan yang lebih baik, sumber air minum yang aman dan lebih banyak air untuk mencuci dapat mencegah penyakit terkait air, penyakit lain, dan kematian, terutama pada anak-anak. Itu juga dapat mendukung perawatan yang lebih baik bagi ibu dan anak di fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, yang

pada gilirannya mendorong kehamilan yang aman dan bayi yang sehat.

Jumlah kematian akibat penyakit umum dan yang dapat dicegah di Timor-Leste terus meningkat, termasuk malaria dan penyakit pernafasan. Pada tahun 2009, harapan hidup saat lahir adalah sekitar 62 tahun. Diperkirakan bahwa tingkat kematian ibu di Timor-Leste masih berkisar antara 440 dan 557 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara kematian bayi adalah sekitar 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Diare sangat umum di kalangan anak-anak. Ini menyumbang 11% kematian balita dan survei terbaru menemukan 16% dari semua anak dibawah lima tahun mengalami diare dalam dua minggu sebelumnya. Tingkat infeksi parasit tinggi, terutama di kalangan anak usia sekolah. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar, termasuk fokus khusus pada kesehatan ibu dan anak, adalah pilar dari Australia-Timor-Leste Strategi Negara 2009-2014 (Strategi Negara).

Untuk permasalah-permasalahan tersebut, Timor Leste masih membutuhkan bantuan-bantuan luar negeri dari negaranegara donor dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Salah satu negara donor dan lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada Timor Leste pada sektor WASH adalah AusAID.

4.1.2 Strategi Timor Leste Meningkatkan Sektor WASH

Pada tahun 2010, pemerintah Timor Leste mengeluarkan strategi nasional mereka untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kerangka pengembangan nasional Strategic Development Plan 2011-2030. Dalam kerangka tersebut, pemerintah Timor Leste bertujuan untuk dapat meningkatkan dan memenuhi standar SDGs pada tiap-tiap aspek kehidupan masyarakat Timor Leste pada tahun 2030.

Dalam SDP 11-30 tersebut, terdapat tiga poin yang dianggap penting oleh Timor Leste. Poin pertama adalah Kemampuan Sosial (Social Capital) yang melingkupi pendidikan dan pelatihan, kesehatan, keterlibatan sosial, lingkungan, budaya. Poin dan kedua adalah Pengembangan Infrastruktur (Infrastructure Development) yang melingkupi infrastruktur ialan, air bersih dan sanitasi, listrik, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi. Poin ketiga adalah Pembangunan Ekonomi yang meliputi pembangunan pedesaan, pertanian, minyak, pariwisata, dan sektor investasi privat. (Rencana Pembangunan Nasional, 2010)

Pada skripsi ini, penulis akan berfokus pada poin kedua yaitu pengembangan infrastruktur dan lebih fokus kepada masalah air bersih dan sanitasi. Menurut laporan SDP 11-30, infrastruktur air bersih dan sanitasi menjadi penyebab utama penyakit, kesehatan yang buruk, dan perkembangan anak yang buruk. Dua penyebab kematian bayi dan anak yang paling signifikan di Timor Leste - infeksi saluran pernafasan dan penyakit diare yang lebih rendah - secara langsung terkait dengan pasokan air dan sanitasi serta kebersihan yang buruk. Menurut Sensus

2010, hanya lebih dari 66% orang di Timor Leste memiliki akses ke sumber minum yang lebih baik (baik air ledeng, sumur terlindung atau pompa tangan, tanker atau air botolan). Hal ini menunjukkan peningkatan besar selama sembilan tahun terakhir dibanding pada pada tahun 2001 yang melaporkan angka hanya sebesar 48%.

Bahkan, 39% hanya ada masyarakat Timor Leste yang menikmati fasilitas air bersih dan sanitasi yang sangat memadai. Bahkan, pemerintah Timor Leste mengklasifikasikan masalah air bersih dan sanitasi sebagai salah satu masalah vital, elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial Timor Leste. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian pada tahun 2008 dimana membuktikan bahwa masalah air bersih dan sanitasi dapat berakibat pada penurunan GDP sebesar 2%. (Rencana Pembangunan Nasional, 2010)

Akses terhadap air bersih dan sanitasi sangat penting bagi masa depan Timor Leste karena akan berdampak pada peningkatan kesehatan publik, menciptakan lapangan kerja baru dan pembangunan wilayah pedesaan, dan dapat menopang sumber daya air. Untuk itu, pada SDP 11-30 pemerintah Timor Leste bertujuan agar pada tahun 2030, semua warga di Timor Leste akan memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang lebih baik.

Pemerintah mengklasifikasikan permasalahan-permasalah sektor WASH ke dalam beberapa permasalahan besar sesuai dengan sumber permasalahan dan target penyelesaian. Hal-hal tersebut adalah

air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, program air bersih untuk sekolah, air bersih dan sanitasi di daerah perkotaan, dan drainase.

4.1.3 Bantuan AusAID Terhadap Sektor Wash Timor Leste

Pada sektor WASH sendiri, Australia telah dari tahun 2002 memulai program untuk meningkatkan kebersihan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Timor Leste. Bantuan AUSAID terhadap permasalahan air bersih dan sanitasi di Timor Leste sendiri telah mulai sejak tahun 2002 melalui tiga tahap bantuan. Tahap pertama adalah Community Water Supply and Sanitation Program (CWSSP) yang dimulai pada tahun 2002 hingga 2005. Tahap kedua adalah Bee, Saneamentu no Ijiene iha Komunidade I (BESIK I) dimulai pada tahun 2007 hingga 2012. Tahap terakhir dari bantuan AUSAID kepada Timor Leste adalah Bee, Saneamentu no ljiene iha Komunidade II (BESIK II) dimulai pada tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2016.

4.2 Implementasi Timor-Leste Rural Water Supply and Sanitation Program II (BESIK II)

Pemerintah Timor Leste menjadikan sektor WASH merupakan masalah no.1 yang harus diselesaikan (GoTL, 2011). Berbagai permasalahan sektor WASH dan implikasi terhadap masyarakat seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya diatas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh program BESIK II. Melihat berbagai tantangan tersebut dan status Timor Leste sebagai

negara low-income country (LIC), AusAID memilih sektor WASH sebagai prioritas bantuan.

Keputusan tersebut merupakan keputusan tepat. Menurut Riddel (2008), dengan bantuan program melalui pendekatan SWAp, jika bantuan diberikan kepada sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh negara resipien maka efektivitas bantuan tersebut akan meningkat dibandingkan dengan jika memberikan bantuan dengan proyek. Hal tersebut terbukti bahwa sejak pemberian bantuan dari tahun 2002 melalui CWSSP hingga BESIK II tahun 2016 ini, pemberian bantuan lebih terfokus dan terarah dengan adanya rekomendasirekomendasi dari tiap-tiap tahap program untuk program selanjutnya.

Seperti halnya CWSSP, dan BESIK I. BESIK II juga meningkatkan dialog antar pemerintah untuk meningkatan kapasitas pemerintahan. Dengan level bantuan program yang terfokus terhadap sektor WASH, maka pembangunan di negara penerima akan lebih luas namun terarah di sektor WASH tersebut. Kanda (2004) menjelaskan bahwa dengan pemberian bantuan dengan SWAp ini akan meningkatkan pembangunan negara melalui kepemilikan penerima dan kepemimpinan negara penerima yang lebih kuat, dialog terkoordinasi dan terbuka untuk seluruh program sektor, meningkatkan manfaat dengan berfokus pada keseluruhan program dan menerapkan standar fidusia / perlindungan umum, karena fokus pada program tertentu sehingga alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien, memperkuat kapasitas, sistem & lembaga negara pada kecepatan dan fase yang layak dengan partisipasi pemerintah negara penerima, mengurangi pelaporan dan transaksi duplikat, dan fokus yang lebih besar pada hasil (bukan pada input atau kontrol transaksi).

Dalam BESIK II, dengan tujuan untuk pembangunan kapasitas berusaha meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait seperti kementerian Kesehatan, Kementerian Pekeriaan Umum kementerian Sosial. Hanya saja, program bantuan AusAID terhadap sektor WASH ini tidak memiliki kerangka kerja sama yang kuat. Selama 10 tahun pertama bantuan Australia kepada Timor-Leste, program negara dioperasikan tanpa posisi kebijakan yang disepakati pada ruang lingkup dan fokusnya. Tanpa posisi seperti itu, sulit mempertahankan fokus dalam untuk menghadapi tuntutan eksternal. (DFAT, 2014).

BESIK II merupakan program lanjutan dari CWSSP dan BESIK I, program design dan concept note BESIK II merupakan rekomendasi dari hasil kedua program sebelumnya tersebut. Hanya saja, sebagai bantuan, dalam timeline bantuan AusAID terhadap sektor WASH mulai dari CWSSP hingga tahun pertama BESIK II ini tidak memiliki kerangka kerja sama kedua belah pihak sebagai dasar. CWSSP dan BESIK I hingga tahun pertama BESIK II hanya memiliki Timor Leste Rural Water Supply and Sanitation Program sebagai pedoman untuk menetapkan tujuan.

Sementara program design dan concept note BESIK II mengambil kerangka

permasalahan dari Strategic Development Plan Timor Leste 2009-2014. Baru pada tahun kedua BESIK II dimulai, terjadi BESIK II perubahan dimana mulai mengadopsi SDP 11-30, dan adanya keria sama Australia & Timor Leste sebagai dasar baru. Kerja sama tersebut adalah Planning Strategic Agreement Development tahun 2011 antara Australia dan Timor Leste. Tidak ada perubahan signifikan dalam strategi BESIK II pasca perubahan tersebut, hanya saja BESIK II menjadi jembatan bagi program-program baru dari kerja sama terbaru kedua belah pihak tersebut.

Riddel (2008) menjelaskan bahwa pentingnya kerangka kerja sama dasar dalam pemberian bantuan melalui pendekatan SWAp agar adanya scope atau fokus kerjaan yang tertarget dan terarah. Laporan DFAT (2014) menerangkan bahwa strategi Australia-Timor Leste dalam sektor WASH pada 10 tahun perjanjian pertama adalah keduanya kekurangan detail; tidak komprehensif dalam menjelaskan lingkup bantuan yang direncanakan atau jelas tentang bagaimana prioritas akan tercermin dalam alokasi sumber daya. Evaluasi tersebut mempertimbangkan bahwa bantuan dapat lebih diprioritaskan secara ketat dengan memasukkan target untuk mengkonsolidasikan program-program negara dan mengurangi jumlah sektor dimana bantuan diberikan dan / atau inisiatif dibawah manajemen. Hal tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan bantuan jangka panjang yang terperinci dan tepat. Ini akan membantu untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dan dukungan yang lebih dapat diprediksi.

Pada implementasi BESIK II, komitmen merupakan hal yang sangat ditekankan. Pada awal implementasi. BESIK II kurang mendapatkan komitmen dari beberapa kementerian, dan beberapa elemen masyarakat. Hal tersebut tentu bagaimana mempengaruhi pencapaian bantuan program WASH ini. Hal ini terbukti dengan kurangnya pencapaian BESIK II dalam hal mencapai target SDP tahun 2015. BESIK II hanya mampu mencapai 24% masyarakat pedesaan untuk akses terhadap sanitasi, sementara target SDP 2015 adalah 40%. Selain itu, hanya 69% dari target 75% masyarakat memiliki akses terhadap air bersih. Kedua target utama ini bahkan diberikan bendera merah pada tahun pertama hingga tahun keempat implementasinya. (ACR, 2016)

implementasinya, Dalam pada tahun 2013 BESIK Ш mengikuti rekomendasi Monitoring & Review Group #1 menjadikan kerja sama SPAD sebagai dasar kerangka bantuan. Sehingga implementasi **BESIK** berikutnya memberikan berbagai rekomendasi untuk program-program bantuan lainnya dibawah kerangka kerja sama tersebut.

Hambatan utama yang saat ini menghambat kemajuan di sektor WASH Timor-Leste terutama terkait dengan kapasitas kelembagaan dan tidak adanya layanan dukungan teknis, akuntabilitas, dan insentif untuk mempertahankan layanan. Ada kekurangan dana untuk membiaya operasi dan pemeliharaan pasokan air, termasuk tidak adanya biaya pengguna

yang dibebankan di sektor perkotaan dan tidak ada strategi yang jelas untuk secara efektif mendukung operasi dan pemeliharaan di sektor pedesaan. (The World Bank, 2015)

Untuk itu, BESIK II fokus terhadap operation & management mulai dari level pemerintahan tertinggi hingga terendah. Level tertinggi mulai dari pembuatan kebijakan yang mendukung tujuan program BESIK II untuk akses dan penggunaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan, serta bagaimana kementerian-kementerian yang ada saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan no.1 ini. Dengan O & M yang ditingkatkan, sistem pasokan air dapat bertahan lebih lama, menghemat biaya penggantian, dan menjadi investasi yang lebih efektif biaya.

Salah satu pencapaian pemberian bantuan teknis adalah dengan berhasilnya kebijakan Water Resource Management Policy & Law (WRMPL) sebagai kerangka untuk menindaklanjuti permasalahan sektor WASH di Timor Leste. Hal ini menjadi kebijakan berkelanjutan untuk mendukung target dan tujuan SDP 11-30 untuk mencapai target SDG tahun 2030. (DFAT, 2016)

Bantuan teknis juga diberikan melalui kontraktor-kontraktor swasta seperti WaterAid dan Aurecon dalam implementasi BESIK II. Kontraktor swasta tersebut bekerja memberikan bantuan terhadap komunitas masyarakat pedesaan Timor Leste dalam penggunaan infrastruktur air bersih yang telah dibangun. Implementasi tersebut dilaksanakan melalui National Pump O&M Program (NPOMP). Bahkan,

beberapa staff DNSA dikirim ke Indonesia untuk menjalani pelatihan mengenai operasional infrastruktur WASH. (MRG #2, 2016)

Secara garis besar, implementasi BESIK II masih belum mencapai target tahap pertama SDG 2030 seperti tertuang dalam SDP 2011. Dua tujuan utama yaitu akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan masih jauh dari target dan mendapat bendera kuning dari DFAT. Namun, dalam kerangka jangka panjang, melihat pencapaian BESIK II memberikan bantuan teknis kepada level pemerintahan hingga level komunitas masyarakat menjadi jembatan untuk pencapaian jangka panjang sektor WASH. (ACR, 2016)

Apalagi setelah BESIK II, dibawah SDAP Australia – Timor Leste sector WASH masih menjadi salah satu sektor yang mendapat bantuan dibawah program Australia-Timor Leste Partnership Human Development (ATLPHD). Hasil dari implementasi BESIK II memberikan beberapa rekomendasi kepada ATLPHD untuk menunjang sektor O & M WASH antara lain: (MRG Final, 2016)

- Pemerintah Timor Leste mengembangkan 'masterplan' untuk akses air pedesaan melalui pendekatan bottom up dimulai dari kotamadya
- Pemerintah Timor Leste mengembangkan kerangka O & M
- Pemerintah Australia dan ATLPHD menyediakan belanja modal untuk sistem air bersih dan sanitasi
- Bantuan berkelanjutan dari
 ATLPHD untuk O & M dan pasokan air

umumnya didasarkan pada rencana pemerintah Timor Leste dan harus fokus pada kegiatan yang sangat terkait dengan pemberian layanan perbaikan. Dukungan ad hoc tidak boleh diberikan.

Adapun dengan ATLPHD yang didasari oleh kerja sama SDAP Australia — Timor Leste sesuai dengan pernyataan Riddel (2008), bahwa sebuah pemberian bantuan membutuhkan kerangka kerja sama yang lebih official dan mengikat untuk meningkatkan komitmen kedua belah pihak dalam melaksanakan program-program bantuan tersebut.

5. KESIMPULAN

Dalam implementasi, BESIK II tidak mencapai target SDP 11-30 tahun 2015. Dalam tujuan kedua dan ketiga ini, BESIK II hanya mampu mencapai 24% masyarakat pedesaan untuk akses terhadap sanitasi, sementara target SDP 2015 adalah 40%. Selain itu, hanya 69% dari target 75% masyarakat memiliki akses terhadap air bersih. Kedua target utama ini bahkan diberikan bendera merah pada tahun pertama tahun keempat hingga implementasinya. garis Secara besar, implementasi BESIK II masih belum mencapai target tahap pertama SDG 2030 seperti tertuang dalam SDP 2011. Dua tujuan utama yaitu akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan masih jauh dari target dan mendapat bendera kuning dari DFAT. Namun, dalam kerangka jangka panjang, melihat pencapaian BESIK II memberikan bantuan teknis kepada level pemerintahan komunitas hingga level

masyarakat menjadi jembatan untuk pencapaian jangka panjang sektor WASH.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Democratic Republic of Timor-Leste (2012).

 Education Management

 Information System (EMIS) 2012.

 Dili: Ministry of Education (MoE)
- Easterly, W. (2008). Reinventing Foreign
 Aids. Massachusetts Instute of
 Technology Press.
- Foxley, A. (2010). Regional Trade Blocs

 The Way To The Future?.

 Washington

 D.C: Carnegie Endowment for International Peace.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Al-Mansur.

 (2012). *Metode Penelitian kualitatif*. Malang:Ar-Ruzmedia.
- Hudson, V. (eds). (2002). Foreign Policy

 Making (Revisited). New York:

 Palgrave Macmillan.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005).

 Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar.
- Kanda, C. (2004). Sector-Wide Approaches:

 Concept, Applications &

 Implications. Water Week 2004.
- Lancester, C. (2007). Foreign Aid:

 Diplomacy, Development,

 Domestic Politics. The University

 of Chicago Press.

- Levin, J., & Milgrom, P. (2004). *Introduction*to Choice Theory. Oxford
 University Press.
- Mahardika, D. (2017). Analisis Bantuan Luar
 Negeri Australia di Timor Leste
 (Studi Kasus AusAID Tahun 2011
 2013). Skripsi.
- Mas'oed, M. (1994). Ilmu Hubungan
 Internasional: Disiplin dan
 Metodologi. Pustaka LP3ES
 Indonesia
- Mintz, A. (2004). How Do Leaders Makes

 Decision? A Poliheuristic

 Perspective. Journal of Conflic

 Resolution, Vol.48 No.1,

 February. Sage Publications
- Mintz, A., & DeRouen K. (2010).

 Understanding Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press.
- Riddel, R. (2007). Does Foreign Aid Really Work?. James Currey.
- Sari, K.R.F. (2015) Upaya Australia Dalam
 Pengurangan Emisi Gas Karbon
 Melalui Kerjasama IAFCP di
 Kabupaten Kapuas, Kalimantan
 Tengah. Skripsi. Universitas
 Udayana.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Alfabeta.

- Slantchev, B.L. (2005). Introduction to International Relations Lecture 3:

 The Rational Actor Model. San Diego: Department of Political Science, University of California.
- Supranto, (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT. Rineka Cipta.
- Tarp, F. (2000). Foreign Aid & Development. Routledge. London.
- Vipassani, P. (2015). Upaya ILO-IPEC

 Melalui WACAP Dalam

 Mengeliminasi dan Mencegah

 Pekerja Anak Pada Perkebunan

 Kakao di Ghana. Skripsi.

 Universitas Udayana.